

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKTOR DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Andi Wahidah¹, Rulinawaty², Hamka Hakim³

¹Universitas Sulawesi Barat
Sulawesi Barat, Indonesia
eric.aan77@gmail.com

²Universitas Terbuka
Tangerang Selatan, Indonesia
ruly@ecampus.ut.ac.id

³STIA Prima Bone
Jl. Urif Sumoharjo
Watampone, Indonesia
karangpulu36@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the rector's policy in improving the quality of education at the University of West Sulawesi. The technique of collecting data is through observation which is carried out by observing directly the object needed focusing on (1) the content of the observation, (2) recording observations: when to record and when to observe the object of research, (3) establishing relationships between observers, interviews, on this stage, the interview applied was a guided free interview. The results showed that the implementation of the rector's policy in the field of education in the aspect of bureaucratic structure regarding organizational governance, charts, division of labor, and hierarchies which are the chain of command in carrying out the main tasks and functions of the holders of authority or authority ranging from rectorate officials to educators (lecturers) and education staff is one of the important factors in running the wheels of an institutional organization.

Keywords: rectorate policy; bureaucracy; hierarchy; authority

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan rektor dalam meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Sulawesi Barat. Teknik pengumpulan data melalui observasi yang dilakukan dengan mengamati secara langsung obyek yang diperlukan, dengan memperhatikan: (1) isi pengamatan, (2) mencatat pengamatan: kapan waktu pencatatan dan kapan mengamati obyek penelitian, (3) menjalin hubungan antara pengamat, wawancara, pada tahapan ini wawancara yang diterapkan adalah wawancara bebas terpimpin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rektor bidang pendidikan pada aspek struktur birokrasi mengenai tata kelola organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang merupakan mata rantai komando dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada pemegang otoritas atau kewenangan mulai dari pejabat rektorat sampai pada tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan roda organisasi institusi.

Keywords: kebijakan rektor; birokrasi; hirarki; wewenang

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dimana pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Perguruan tinggi yang dimaksudkan adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan dan/atau

diselenggarakan oleh pemerintah yang memiliki peran administrator. (Aripin & Daud, 2014)

Kemudian pendidikan tinggi bertujuan sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 5(a) berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa, (b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan/ atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (c) dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia dan (d) terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut yang mana perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang dipimpin oleh rektor secara kelembagaan atau organisasi dalam sebuah perguruan tinggi, rektor sekaligus pimpinan organisasi perguruan tinggi yang berkantor dalam sebuah perguruan tinggi setingkat universitas /institute atau sejenisnya yang disebut rektorat yang membawahi seperangkat instrument, sebagaimana garis garis besar Statuta masing masing Perguruan Tinggi. Rektor merupakan pimpinan tertinggi dalam sebuah organisasi rektorat yang membawahi beberapa wakil lembaga-lembaga tertentu termasuk lembaga penjaminan mutu yang bertugas sebagai pengambil kebijakan yang kurang lebih berorientasi pada kurikulum pembelajaran mahasiswa yang mampu menguasai literasi baru(Aripin & Daud, 2014).

Demikian halnya dengan kelompok sasaran, kelompok sasaran yang dimaksudkan disini adalah mereka yang diminta oleh kebijakan untuk mengadopsi pola-pola interaksi baru, kelompok sasaran ini adalah orang-orang paling banyak terkena dampak kebijakan(Aripin, Rulinawaty, & Samboteng, 2021), yang dimaksudkan oleh penulis orang yang berada pada sturuktur maupun pada unit birokrasi Universitas Sulawesi Barat yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan belum sepenuhnya berjalan. Kemudian faktor-faktor lingkungan, faktor-faktor lingkungan tersebut adalah unsur-unsur komponen yang ada dalam lingkungan yang berpengaruh terhadap atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan rektordalam meningkatkan mutu pendidikan di Unsulbar, belum cukup memadai, Contohnya, gedung rektorat (gedung perkantoran) ruang kuliah, fasilitas perpustakaan, laboratorium dan kualitas dosen pendidikan yang umumnya berpendidikan strata dua.

Melihat latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut yakni Bagaimana implementasi kebijakan rektor dalam meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Sulawesi Barat?

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan rektor dalam meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Sulawesi Barat.

Kegunaan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, informasi dan bukti empiris khususnya mengenai administrasi publik dan prespektif implementasi kebijakan rektor dalam meningkatkan mutu pendidikan di Unsulbar.

2. Penelitian ini diharapkan agar sebagai mahasiswa program magister administrasi publik dapat menambah wawasan keilmuan dan menemukan teori-teori tentang administrasi publik yang berhubungan dengan implementasi kebijakan rektor dalam meningkatkan mutu pendidikan di Unsulbar.

TINJAUAN PUSTAKA

Penggunaan istilah implementasi pertama sekali digunakan oleh Lasswell (Rulinawati, 2013) Sebagai ilmuwan yang pertama sekali mengembangkan studi tentang kebijakan publik, Lasswell menggagas suatu pendekatan yang disebut sebagai pendekatan proses (*policy process approach*). Menurutny, agar ilmuwan memperoleh pemahaman yang baik tentang apa sesungguhnya kebijakan publik, maka kebijakan publik harus diurai menjadi beberapa bagian sebagai tahapantahapan, yaitu: agenda-setting, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi dan terminasi.

Pengertian lain dikemukakan oleh Maarse bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Rulinawati, 2013). Sedangkan konsep lain menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut oleh pejabat atau instansi pelaksana. Senada dengan itu Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier (Mazmanian & Sabatier, 1981) memberikan penjelasan mengenai makna implementasi tersebut sebagai berikut: “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministerasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Implementasi kebijakan publik harus diwujudkan dalam bentuk program-program yang lebih rinci, seperti yang dikemukakan Grindle bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan sejumlah biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut (Schofield, 2001).

Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam waktu jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan (Rulinawaty Kasmad, Samboteng, & Mahsyar, 2019). Oleh karena itu, sebuah program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi merupakan tahapan atau serangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia. Implementasi kebijakan merupakan hal yang paling berat, karena disini masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan (Alwi & Kasmad, 2018) Oleh karena dalam implementasi kebijakan terkadang muncul masalah yang tidak dijumpai dalam konsep namun muncul di lapangan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses, serangkaian keputusan dan tindakan yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya. Proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, namun ia nya juga menyangkut kepada jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang terlibat dengan beragam aturan spesifik, situasi yang serba ideal dari segi perundangannya yang sudah jelas, unit-unit organisasi berikut staf yang di beri tugas sudah terlatih dengan baik, biaya yang diperlukan sudah tersedia, dan tentu diperlukan penyesuaian. Meski situasi dan kondisinya telah dianggap cukup ideal, kemungkinan proses implementasi masih berliku dan tidak mudah(Aripin, Rulinawaty, & Kharisma, n.d.).

Organisasi Rektorat

Rektorat merupakan suatu lembaga yang dikendalikan oleh seorang pejabat professional yaitu Rektor dalam organisasi Universitas yang bertugas mengatur semua sumber yang dalam organisasi dan melakukan kerjasama dengan dosen secara bersama-sama dalam mendidik mahasiswa sebagai masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan, yang mana Universitas sebagai institusi pelayan publik.

Organisasi timbul bilamana orang-orang bergabung dalam usaha mereka dalam mencapai tujuan bersama.(Rulinawaty et al., 2021) organisasi ada bila orang-orang berhubungan satu sama lain, mau menyumbangkan kegiatan-kegiatan atau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.”(Castro, 2019) organisasi sebagai satu kesatuan hubungan yang resmi untuk mencapai tujuan-tujuan. Dalam bekerja sama itu orang-orang perlu diperlengkapi dengan alat-alat dana dan teknologi dan bahwa orang terikat pada lingkungan dan peraturan tertentu, sehingga dengan demikian mereka diharapkan dapat dengan sukses mencapai sasaran dengan sukses(Castro, 2019). Oleh sebab itu pengertian organisasi dalam dinamikanya ini maka organisasi dapat disimpulkan sebagai “kerja sama orang-orang atau sekelompok orang dengan menggunakan dana, alat-alat dan teknologi, serta mau terikat dengan peraturan-peraturan dan lingkungan tertentu supaya dapat mengarah pada pencapaian tujuan yang diinginkan.”

Mutu Pendidikan

Kata “Mutu” berasal dari bahasa Inggris “Quality” yang berarti kualitas. Mutu berarti merupakan sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri. Sesuai keberadaannya, mutu dipandang sebagai nilai tertinggi dari suatu produk atau jasa. Mutu adalah derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang atau jasa. Terdapat banyak pengertian tentang mutu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah (ukuran) baik buruk suatu benda, kadar, taraf, derajat, atau kualitas, kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya.

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan(Marwan, 2022). Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan. Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan.

Akan tetapi, agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (output) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai setiap tahun atau kurun waktu lainnya. (Manasikana & Anggraeni, 2018)

Pada hakikatnya beberapa pengertian mutu tersebut adalah sama dan memiliki elemen-elemen sebagai berikut: pertama, meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kedua, mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. Ketiga, merupakan kondisi yang selalu berubah. Berdasarkan elemen-elemen tersebut maka mutu dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi bahkan melebihi harapan. Sementara jika dilihat dari sisi pendidikan, mutu pendidikan dapat diartikan sebagai kemampuan pendidikan tinggi dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan Pendidikan Tinggi, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku.

Penelitian Terdahulu

Adapun tujuan menggambarkan dari penelitian terdahulu yaitu untuk memperkuat hasil dari penelitian yang sedang dilakukan, dan selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nillam Martha Sonia Ningrum, dkk (2018).	Implementasi Kebijakan Rektor Tentang Tata Krama dan Etika Mahasiswa di UKM/Ormawa Universitas Negeri Padang.	Hasil penelitian menunjukkan yaitu masih rendahnya pemahaman dan kesadaran mahasiswa terhadap isi kebijakan, sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai, kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada para pelanggar dan masih kurangnya pengawasan dari Rektor dan pihak terkait lainnya.	Jenis penelitian adalah sama deskriptif kualitatif. Ruang lingkup penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Dalam ranah Perguruan Tinggi.	Lokus peneliti terdahulu adalah di Universitas Negeri Padang, sementara penulis mengadakan penelitian di Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR).
2.	Aminuddin Bakry (2010)	Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan pendidikan merupakan proses pemanusiaan yang terjadi dalam lingkungan alam dan sosialnya sehingga kebijakan pendidikan adalah penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu.	Ruang lingkup penelitian yaitu tentang Implementasi Kebijakan Jenis penelitian adalah sama deskriptif kualitatif.	Lokus peneliti terdahulu adalah Studi Kasus di Kabupaten Jembrana. Bali, Sementara penulis mengadakan penelitian di UNSULBAR
3.	Ahmad	Implementasi	Hasil penelitian ini	Ruang lingkup	Lokus peneliti

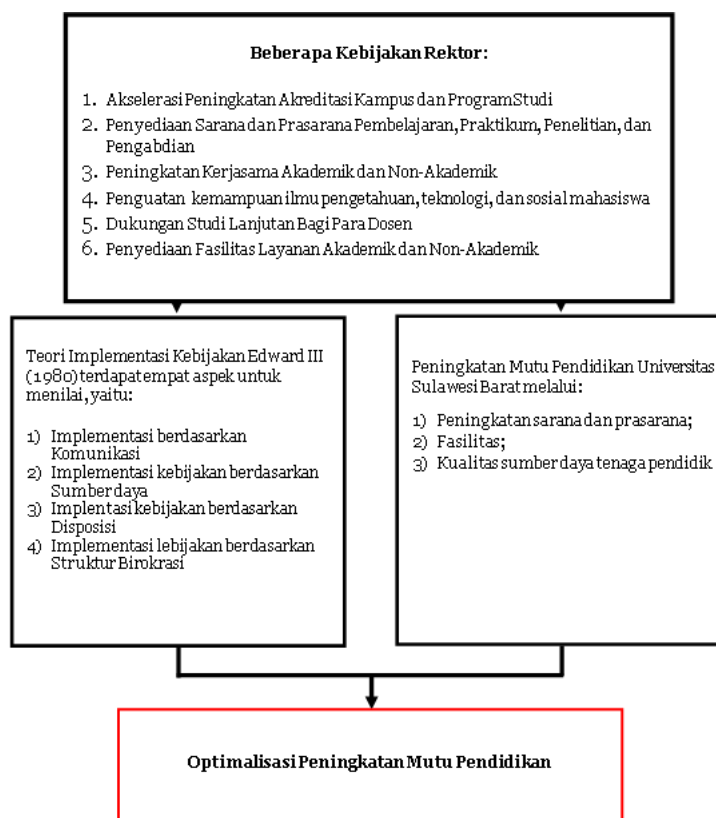
	Sulaiman, Udik, B. Wibowo (2016).	Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gadjah Mada.	menunjukkan bahwa Kendala yang dihadapi dalam implementasi SPMI di UGM adalah: komitmen pimpinan relatif kurang, jumlah tenaga auditor yang masih terbatas, kegiatan SPMI sering terjebak menjadi kegiatan rutin.	penelitian yaitu tentang Implementasi kebijakan dalam ranah Perguruan Tinggi. Jenis penelitian adalah sama Deskriptif Kualitatif.	terahulu adalah di Kantor Jaminan Mutu UGM sementara penulis mengadakan penelitian di UNSULBAR.
4.	Wiwik Suryandartiwi Anggarawati, (2017).	Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Sekolah Tinggi dan Akademi Bidang Kesehatan Melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing Sekolah Tinggi dan Akademi Bidang Kesehatan di Provinsi DIY menunjukkan banyak perbedaan dalam menerapkan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), namun sebagian besar menunjukkan bahwa SPMI diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada, hanya saja masih terdapat kekurangan pada kelengkapan dokumen mutu serta masih ada yang mengacu peraturan lama.	Ruang lingkup penelitian yaitu implementasi Kebijakan dalam ranah Perguruan Tinggi. Jenis penelitian adalah sama Deskriptif Kualitatif.	Lokas peneliti terdahulu adalah di Akademi Bidang Kesehatan, DIY, sementara penulis mengadakan penelitian di UNSULBAR.
5.	Mujianto Solichin (2015),	Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi	Hasil penelitian ini menunjukkan dapat diketahui bahwa Implementasi kebijakan dan peran birokrasi di bidang pendidikan dibutuhkan birokrasi pendidikan yang mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan memahami kebutuhan masyarakat yang dilayani. Kinerja birokrasi melalui responbilitas harus terus ditingkatkan untuk menciptakan pelayanan prima terutama merespon kepentingan publik.	Ruang lingkup penelitian yaitu tentang Implementasi kebijakan. Jenis penelitian sama kualitatif deskriptif.	Lokas peneliti terdahulu adalah di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, sementara penulis mengadakan penelitian di UNSULBAR.

Kerangka Konsep

Dalam kerangka berfikir ini diuraikan secara detail mengenai Implementasi Kebijakan Rektor dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Sulawesi Barat. Adapun implementasi kebijakan yang dimaksudkan oleh penulis adalah sejauh mana

implementasi kebijakan tersebut dapat terlaksana. Sebagaimana kebijakan yang dimaksudkan adalah terlaksananya pola-pola interaksi berdasarkan komunikasi yang diinginkan oleh mereka yang telah mendefinisikan kebijakan. Demikian halnya terbentuknya kelompok sasaran, yang dimaksudkan adalah mereka yang diminta oleh kebijakan untuk mengadopsi pola-pola interaksi baru berdasarkan sumber daya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas implementasi kebijakan itu bersumber dari sebuah lembaga perguruan tinggi Universitas Sulawesi Barat yang dipimpin oleh rektor beserta prangkatnya sebagai pengambil kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengambilan kebijakan tersebut adalah berkaitan dengan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pengembangan potensi tenaga pengajaran kompetensi tenaga kependidikan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan yang akan berdampak pada perjalanan organisasi/kelembagaan Unsulbar. Untuk lebih jelasnya terkait dengan implementasi kebijakan rektor dalam meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Sulawesi Barat, maka dievaluasi menggunakan Teori Analisis Kebijakan yang kemukakan oleh Edward III melalui empat aspek yakni komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi (Rulinawati, 2013) dapat dilihat dalam gambar kerangka berpikir berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian adalah deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode

yang bertujuan membuat secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Maxwell & others, 2008). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode untuk mengartikan, memahami, mempelajari, dan meneliti serta melukiskan fenomena atau peristiwa pada masa sekarang secara sistematis. Berkaitan dengan penelitian ini maka fenomena yang akan dilihat adalah mengenai implementasi kebijakan rektor dalam meningkatkan mutu pendidikan di Unsulbar.

Sumber-sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Seluruh informasi yang telah ditemui sebelumnya dapat digabungkan dengan memilih satuan berikutnya. Untuk memulai tidak menjadi masalah bagi penulis tentang siapa dan dimana. Namun, apabila terjadi kekeliruan setelah berjalan maka penulis dapat memilih sesuai dengan apa yang diperlukan. Ketetapan informan dilapangan berdasarkan prinsip kejenuhan informasi. Apabila masih membutuhkan informasi setelah memperoleh informasi dari informan sebelumnya maka peneliti mencari lagi informan yang diperkirakan memiliki informasi yang masih dibutuhkan dalam pengembangan tulisan, sebaliknya jika dengan menambah informan didapatkan informasi yang sama berarti jumlah informan dinyatakan cukup, karena informasi telah memadai. Secara perseorangan dalam satuan kajian sudah penulis ketahui, sehingga pengumpulan data dipusatkan disekitar satuan kajian tersebut. Kriteria menentukan subyek penelitian (informan), sebagai berikut.

1. Informan merupakan orang yang mengetahui secara pasti situasi, sehingga kondisi tersebut tidak hanya mengetahui tetapi juga memahami.
2. Informan tersebut pernah terlibat atau masih terlibat dalam kegiatan
3. Informan tersebut pernah berkecimpung atau masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang akan diteliti.
4. Informan itu bersedia atau mempunyai waktu untuk dimintai informasi terkait penelitian.
5. Informan tersebut, awalnya masih asing dengan penulis, untuk kemudian bisa menerima penulis dalam suasana kekerabatan sehingga dapat dijadikan narasumber.
6. Penulis menggabungkan informan dengan menganalisis kejadian menurut perspektif mereka dan memilih informan yang menggunakan teori partisipatif.
7. Informan pada penelitian ini adalah Rektor, dekan, beberapa dosen, mahasiswa dan staff akademik Universitas Sulawesi barat dipilih secara random sampling.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah berupa pedoman wawancara (kuisisioner), alat tulis (pulpen), kertas, serta alat berupa tape recorder dan kamera guna mengambil gambar (foto), yang berhubungan dengan obyek penelitian, kesemuanya dimanfaatkan oleh penulis dalam penelitian untuk pelaksanaan pengumpulan data penelitian di lapangan, selaku perencana, pelaksana, analis dan penafsir data dan sekaligus menjadi pelapor penulisan akhir dalam penelitian ini (Miles & Huberman, 1984).

Prosedur Pengumpulan Data

Adapun proses mekanisme pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Observasi, pada tahapan ini penulis lebih aktif mewawancarai subyek (informan) kemudian mengembangkan hubungan-hubungan yang aktif di antara mereka, kemudian diberbagai situasi dapat segera pindah ke banyak keterlibatan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung obyek yang diperlukan, dengan memperhatikan: (1) isi pengamatan, (2) mencatat pengamatan: kapan waktu pencatatan dan kapan mengamati obyek penelitian, (3) menjalin hubungan antara pengamat. Daftar pedoman observasi yang dibuat disesuaikan dengan observasi umum yang divisualisasikan di lokasi penelitian.
2. Wawancara, pada tahapan ini wawancara yang diterapkan adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Pada wawancara jenis ini, membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ia menyimpang. Pedoman wawancara berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai dalam kegiatan merupakan sumber data utama. Sumber data utama tersebut dapat diperoleh melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tape, pengambilan foto.
3. Dokumentasi, dokumentasi dilakukan guna mengumpulkan data sekunder yang sudah tertulis. Dokumen resmi, dapat diperoleh di instansi terkait. Sumber tertulis berupa buku, termasuk jurnal juga karya ilmiah lainnya yang sangat berharga sebagai referensi bagi pengembangan penulisan ini. Dari sumber-sumber tersebut, penulis memperoleh pula informasi seputar judul penelitian.

Metode Analisis Data

Analisis dilakukan mempergunakan tiga alur kegiatan secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Aktivitas dalam analisis data dilakukan dengancara berikut:

1. Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, yakni Implementasi kebijakan.
2. Penyajian data. Data yang bertumpuk-tumpuk kurang dapat memberikan informasi secara tepat.
3. Pengambilan keputusan dan verifikasi. Dari data yang diperoleh, penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Rektor bidang pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan merupakan tindak lanjut dari kebijakan Permen ristik Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Sebagaiman Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan

Mutu Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unsulbar tahun 2019. Bahwa untuk meningkatkan mutu suatu pendidikan tinggi yang perlu dipertegas adalah visi dan orientasi, dimana perguruan tinggi merupakan sebuah institusi publik yang memberikan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat dan Perguruan Tinggi pun merupakan lembaga pengembangan ilmu yang bertujuan dapat melahirkan masyarakat yang punya pengetahuan, punya keahlian, kompeten dan memiliki keterampilan, maka dari itu yang mendukung usaha untuk meningkatkan mutu Perguruan Tinggi sebagai lembaga Pendidikan Tinggi sangat ditentukan oleh Sarana dan prasarana (gedung, ruang perkantoran dan ruang kuliah). Fasilitas yang memadai (perpustakaan dan laboratorium). Kualitas dosen dengan komitmen waktu yang cukup untuk mengajar. Kemampuan meneliti yang secara terus menerus guna meningkatkan kompetensi dan keahliannya. Dalam implementasi kebijakan rektor dalam meningkatkan mutu pendidikan di Unsulbar, penulis melihat langsung dan sekaligus melakukan wawancara dengan beberapa informan yang sehubungan dengan sejauh mana penyelenggaraan implementasi kebijakan yang ada dalam Unsulbar yang berhubungan dengan hal tersebut diatas pada pendekatan melalui proses penyelenggaraan yang penulis kaji dari aspek Komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap) dan struktur birokrasi yang merupakan aspek yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain sebagai alat ukur pada proses berlangsungnya implementasi kebijakan. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan implementasi kebijakan rektor dalam meningkatkan mutu pendidikan di Unsulbar dijabarkan dalam sub pembahasan berikut ini.

a. Komunikasi

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan yang mana penting untuk disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan .

Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan pada tanggal 25 September 2020 yakni informan (AD) mengemukakan pada penulis bahwa;

“Seluruh kebijakan rektorat dikomunikasikan melalui Rapat senat yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kementerian, senantiasa selalu saya tindak lanjuti kebawah pada semua pihak yang berhubungan dengan kewenangan yang diberikan pada saya khususnya terkait dengan bidang pendidikan misalnya, kebijakan tentang mutu pendidikan, ini harus diimplementasikan pada semua fakultas dan lembaga yang mempunyai kapasitas mengurus kegiatan pendidikan, namun dalam pelaksanaannya pada pihak-pihak yang telah mendapatkan tugas itu, perlu sinergitas yang baik antar semua komponen”.

Informan (AD) ini adalah Rektor Unsulbar yang mengungkapkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan Rektorat yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan senantiasa dikomunikasikan pada yang berwenang, walaupun untuk pelaksanaan kebijakan yang diimplementasikan itu diperlukan kerjasama dan sinergitas antara semua komponen dalam saling memberi informasi, hal ini belum berjalan secara maksimal.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan (ZB) pada tanggal 29 September 2020 menyatakan bahwa:

“Kebijakan mengenai kegiatan pendidikan, senantiasa saya komunikasikan pada stakeholder kependidikan dalam lingkup unsubar, saya lakukan dengan cara rapat bersama, namun yang menghadiri rapat bersama itu, terkadang tidak semuanya hadir, dan sangsi untuk itu belum ada yang bersifat administrative, lagi pula pasilitas pendukung mengenai kegiatan pendidikan termasuk pasilitas komunikasi belum tersedia dengan baik”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan (BH) pada tanggal 01 Oktober 2020 menyatakan bahwa:

“Menurut saya yang mengkomunikasikan penyelenggaraan implementasi kebijakan pendidikan adalah pihak-pihak termasuk pejabat rektorat, dekan, kaprodi dan staf bidang akademik, akan tetapi pada prakteknya dalam mensosialisasikan kebijakan pendidikan sebagai usaha untuk mutu pendidikan belum berjalan lancar”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan (SS) pada tanggal 05 Oktober 2020 menyatakan bahwa:

“Kebijakan yang turun dari rektorat Unsulbar yang mengsosialisasikannya tentunya adalah para pejabat yang ada dalam lingkupm unsulbar, rupanya terkadang hal tersebut tidak berjalan dengan baik karena saya sebagai dosen terkadang tidak mendapatkan informasi secara jelas kegiatan-kegiatan pendidikan yang akan dilaksanakan oleh dosen, ini mungkin karena tidak terbagung komunikasi dengan baik”

Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan memiliki peran penting agar kebijakan dapat tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran.

b. Aspek Sumber Daya

Dalam mengimplementasikan kebijakan Rektorat bidang pendidikan untuk menindak lanjuti Kebijakan Kementerian Pendidikan. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik(Lukman Samboteng, Rulinawaty, Akbar, & Muh.Rachmat Kasmad, 2020). Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumbersuber daya lain yang diperlukan diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan (ZB) pada tanggal 23 Oktober 2020 menyatakan bahwa:

“Sumber daya mempunyai peran sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan karena dalam kegiatan pendidikan diperlukan sumber daya utamanya

sumber daya manusia yang baik, terutama pada jenjang pendidikan para dosen maupun tenaga kependidikan karena masyarakat sebagai penerima layanan pendidikan mereka sangat berharap untuk memperoleh ilmu pengetahuan di Universitas Sulawesi Barat ini, dan mereka dapat mempertanggungjawabkannya terutama dalam dunia kerja, namun sumber daya manusia tenaga pengajar kita yaitu dosen yang ada belum memadai”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan (BH) pada tanggal 01 Oktober 2020 menyatakan bahwa:

“Implementasikan kebijakan rektorat di bidang pendidikan, sumber daya mempunyai peran penting dalam kegiatan pendidikan, namun di Universitas Sulawesi Barat ini masih sangat belum memadai utamanya sumber daya manusia yang mempunyai jenjang pendidikan tertinggi, misalnya, yang berkualifikasi Doktor untuk semua program studi, sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan Pendidikan Tinggi yang ditindaklanjuti oleh kebijakan rektorat belum bisa berjalan secara maksimal, dibanding jumlah masyarakat yang masuk ke universitas Sulawesi Barat setiap tahunnya menuntut ilmu”

Universitas Sulawesi Barat sebagai usaha untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan bagi dosen diberi kesempatan untuk meningkatkan sumber dayanya melalui peningkatan strata pendidikan yang tadinya hanya berkualifikasi strata dua ditingkatkan menjadi strata tiga dan kesempatan ini berlaku untuk semua program studi yang disesuaikan dengan program studi yang ada di universitas Sulawesi barat dan setiap tahunnya diadakan rekrutmen tenaga pengajar bagi program studi yang kekurangan dosen.

Untuk memperbaiki sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya di Universitas Sulawesi Barat ini diharapkan pada seluruh dosen sebagai orang yang memberi pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang menuntut ilmu di Universitas Sulawesi Barat agar mengikuti pendidikan dalam rangka meningkatkan kualifikasi pendidikannya, dan dapat diusulkan untuk mendapatkan beasiswa, bagi yang tidak lulus tes untuk mendapatkan beasiswa dapat menggunakan biaya sendiri dan diberi status izin belajar.

Implementasikan kebijakan Rektorat bidang pendidikan sebagai tindak lanjut Kebijakan Kementerian Pendidikan, yang berdasarkan dengan Sumber Daya, yang mana penulis melihat sebagai salah satu aspek dalam menyelenggarakan implementasi kebijakan Rektorat bidang pendidikan di Unsulbar.

Dalam mengimplementasikan kebijakan rektorat di bidang pendidikan, sumber daya mempunyai peran penting dalam kegiatan pendidikan, namun di Universitas Sulawesi Barat ini masih sangat belum memadai utamanya sumber daya manusia yang mempunyai jenjang pendidikan tertinggi, misalnya, yang berkualifikasi doktor untuk semua program studi, sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan Pendidikan Tinggi yang ditindak lanjuti oleh kebijakan rektorat belum bisa berjalan secara maksimal, pada hal jumlah masyarakat yang masuk ke Universitas Sulawesi Barat sebagai perguruan tinggi negeri dalam menuntut ilmu senantiasa setiap tahunnya bertambah.

c. Aspek Disposisi.

Pada aspek ini akan dilihat sejauhmana para pemangku kepentingan adanya kemauan dan kecendrungan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang sehubungan dengan disposisi ini.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan (BH) pada tanggal 01 Oktober 2020 menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya dalam mengimplemetasikan kebijakan rektorat, kalau saya perhatikan teman-teman yang lain tetap ada kecendrungan untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh, hanya saja terkadang kita ini terkendala oleh factor pendanaan dan fasilitas yang kurang memadai misalnya, ruangan alat IT artinya sarana maupun prasarana yang belum memadai, sehingga kebijakan pendidikan belum bisa terselenggara secara memuaskan”

Penyelenggaraan implementasi kebijakan rektorat bidang pendidikan adalah tanggung jawab Universitas Sulawesi Barat harus dilaksanakan secara lebih baik dan secara bersama sama berkomitmen. Menindaklanjuti kebijakan pendidikan sesuai kebijakan kementerian pendidikan menggunakan standar oprasional prosedur dan prosedur baku oprasional dalam melaksanakan kebijakan terkait dengan pendidikan.

Penyelenggaran implementasi kebijakan bidang pendidikan dalam melaksanakan tanggung dapat terlaksana secara optimal, oleh karena itu dalam melaksanakannya digunakan Sembilan kriteria dokumen yaitu visi misi, tata pamong, sumber daya manusia, kemahasiswaan, keuangan sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian, pengabdian, keluaran dan dampak tridharma, namun semua ini belum berjalan secara maksimal yang disebabkan oleh sumber daya manusia, dana dan komitmen”

Pada dasar disposisi dalam mengimplementasikan kebijakan terlihat dari faktor sarana dan prasarana yang merupakan infrastruktur dalam menindaklanjuti kebijakan rektorat tersebut belum cukup tersedia. Walaupun kebijakan pendidikan atas disposisi kebijakan Kementerian telah memiliki instrument dalam menerapkan kebijakan yakni standard oprasional prosedur dan prosedur baku oprasional dalam melaksanakan kebijakan terkait dengan pendidikan, tetap kurang berjalan secara efektif dikarenakan kurang terciptanya sinergitas pada semua pihak-pihak yang berhubungan dengan pemangku tugas dan fungsi kebijakan rektorat bidang pendidikan pada hal dalam melaksanakannya digunakan sembilan kriteria dokumen yaitu visi misi, tata pamong, sumber daya manusia, kemahasiswaan, keuangan sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian, pengabdian, keluaran dan dampak tridharma, berdasarkan hal itu menurut pengamatan penulis masih sebatas konsep yang belum direalisasikan, terbukti hampir seluruh kelembagaan program studi di Unsulbar masih berakreditasi tidak unggul atau umumnya akreditasi program studi tersebut masuk kategori nilai C.

d. Aspek Struktur Birokrasi.

Dalam penyelenggaraan implementasi kebijakan, aspek struktur birokrasi mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan, yang mana struktur birokrasi berfungsi untuk mengatur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki, sehingga penyelenggaraan implementasi kebijakan yang mealalui organisasi rektorat bidang pendidikan berjalan sesuai dengan proses yang ada di Unsubar. Olehnya itu penulis didalam penelitian ini mencoba melakukan wawancara atau konfirmasi kepada

beberapa informan yang sehubungan dengan implementasi kebijakan rektorat bidang pendidikan di Unsulbar.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan (ZB) pada tanggal 23 Oktober 2020 menyatakan bahwa:

“Menurut saya struktur birokrasi untuk mengimplementasikan kebijakan berjalan sesuai mekanisme yang ada baik secara vertikal maupun secara horizontal yaitu diimplementasikan dari pimpinan sampai pada staf ditingkat fakultas, begitu juga tetap dilaksanakan koordinasi sesama unsur pimpinan, namun dalam pelaksanaannya perlu ada pengawasan dan monitoring”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan (KM) pada tanggal 30 November 2020 menyatakan bahwa:

“Untuk mengimplementasikan kebijakan rektorat bidang pendidikan dilaksanakan berdasarkan proses yang dilakukan oleh pejabat sesuai hierarki maupun dosen berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing masing, namun belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik yang disebabkan oleh belum kuatnya komitmen, misalnya belum adanya sanksi tentang pelanggaran dalam penyelenggaraan implementasi kebijakan untuk pendidikan”

Struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan difungsikan untuk mengukur perkembangan kinerja para kordinator program studi, tenaga kependidikan berdasarkan hierarki dan kinerja dosen dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing, walaupun hal ini belum terlaksana secara maksimal disebabkan masih terbatasnya sumber daya khususnya kualitas sumber daya manusia”.

Struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan relatif belum sepenuhnya berjalan sesuai mekanisme yang ada baik secara vertikal maupun secara horizontal yaitu diimplementasikannya kebijakan pendidikan dari pimpinan sampai ke tingkat fakultas, begitu juga pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi belum optimal dikarenakan oleh factor komitmen dan sumber daya manusia(Rulinawaty;, Samboteng;, Aripin;, & Hasanuddin, 2020).

Implementasi kebijakan pendidikan yang dilaksanakan berdasarakan hierarki kewenangan, terkadang tidak berjalan lancar dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada pihak yang berwenang terutama kepada kordinator-kordinator program studi dan tenaga pendidik maupun pada tenaga kependidikan yang berkewenangan untuk itu, dan struktur birokrasi berperan sebagai prangkat organisasi yang menghubungkan tugas dan fungsi bagi penyelenggara dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan, akan tetapi belum optimalnya kegiatan sumber daya tersebut, membuat peran berdasarkan struktur birokrasi belum sepenuhnya berjalan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan penyelenggaraan implementasi kebijakan rektorat bidang pendidikan di Universitas Sulawesi Barat, dimana implementasi kebijakan yang dimaksudkan pada

- a) ..aspek komunikasi dalam melaksanakan kebijakan rektorat, proses komunikasi itu tidak berjalan efektif yang disebabkan oleh factor pasilitas yang tidak memadai.
 - b) .aspek sumber daya tidak memberi kontribusi yang cukup maksimal lantaran sumber Dana yang terbatas, lagi pula sumber daya manusia yang belum mencukupi.
 - c) ..aspek disposisi juga belum berjalan secara maksimal yang sebenarnya diperlukan sikap ketegasan pimpinan dalam memberi perintah terhadap bawahannya,
 - d) .aspek struktur birokrasi mengenai tata kelola organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang merupakan mata rantai komando dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada pemegang otoritas atau kewenangan mulai dari pejabat rektorat sampai pada tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan roda organisasi institusi, walaupun dimediasi oleh koridor standar oprasional prosedur dan panduan baku oprasional, namun hal ini belum berjalan secara baik.
2. Penyelenggarakan kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Sulawesi Barat, berdasarkan pada aspek sarana dan prasarana terutama sarana gedung kegiatan pertemuan dan atau sebagai tempat acara seremonial, gedung perkantoran dan ruangan perkuliahan belum layak. Begitu pula terhadap pasilitas yang dapat mendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan utamanya perpustakaan dan laboratorium yang merupakan pasilitas literasi bagi mahasiswa untuk mendapatkan informasi, buku-buku, jurnal, artikel maupun dokumen yang dibutuhkan belum memadai, juga laboratorium sebagai pasilitas tempat praktek khususnya bagi mahasiswa pada program studi eksakta, juga belum cukup layak.
- Demikian halnya dengan kualitas dosen yang merupakan salah satu penentu kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, dimana ketersediaan waktu yang disesuaikan dengan waktu mengajar masih terdapat dosen yang belum sangat kuat pada komitmen tridharma perguruan tinggi

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan rektorat di bidang pendidikan di Unsulbar sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan diharapkan kordinasi kerjasama dibidang informasi, perkuat komitmen terhadap proses maksimalisasi sumber daya serta peningkatan motivasi kemampuan sumber daya manusia.
2. Dalam menindaklanjuti kebijakan yang terkait peningkatan mutu pendidikan, maka diharapkan sarana dan prasarana pendidikan lebih ditingkatkan, kemudian fasilitas pendidikan perlu ditingkatkan karena merupakan hal yang sangat penting untuk peningkatkan mutu pendidikan bagi mahasiswa, dan yang

tidak kalah pentingnya dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai mutu pendidikan, kualitas dosen perlu mendapatkan perhatian yang prioritas mengenai kualifikasi jenjang pendidikan yang lebih baik untuk memperkuat kompetensi dan keahlian keilmuan serta diharapkan mendapatkan motivasi untuk senantiasa berinovasi menciptakan karya-karya ilmiah, penulisan buku dan jurnal yang berskala internasional

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, & Kasmad, R. (2018). Local collaborative network: Is it smart implementer of the cocoa business development policy in Indonesia? *International Journal of Public Policy*, 14(5–6). <https://doi.org/10.1504/ijpp.2018.10017926>
- Aripin, S., & Daud, M. (2014). Peran Administrator Publik dalam Formulasi dan Implementasi Kebijakan (Analisis Kurikulum 2013). *Academica: Majalah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 1158–1169. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/28482/>
- Aripin, S., Rulinawaty, & Kharisma, B. (n.d.). Tax Policies the System of Tax Regional Hierarchy in Regional Tax Revenues in Indonesia. In *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net (Vol. 14). Retrieved from www.ijicc.net
- Aripin, S., Rulinawaty, & Samboteng, L. (2021). Agile Bureaucracy for Public Policy Accountability: Implementation of the Street Vendor Policy in Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 564(Icas 2020), 108–116. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210629.021>
- Castro, R. (2019). Blended learning in higher education: Trends and capabilities. *Education and Information Technologies*, 24(4), 2523–2546. <https://doi.org/10.1007/s10639-019-09886-3>
- Lukman Samboteng, Rulinawaty, Akbar, M. F., & Muh.Rachmat Kasmad. (2020). *Talent management of state civil officers (ASN), bureaucratic digitalization era in Indonesia*. 41(31), 157–169.
- Manasikana, A., & Anggraeni, C. W. (2018). Pendidikan karakter dan mutu pendidikan indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 2018, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 102–110. Retrieved from [https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/10206/Makalah 13 Arina Manasikana.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/10206/Makalah%20Arina%20Manasikana.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Marwan, E. (2022). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah. *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 12(2), 1–10. <https://doi.org/10.55558/alihda.v12i2.2>
- Maxwell, J. A., & others. (2008). Designing a qualitative study. *The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods*, 2, 214–253.
- Mazmanian, D., & Sabatier, P. (1981). Liberalism, environmentalism, and partisanship in public policy-making: The California Coastal Commissions. *Environment and Behavior*, 13(3), 361–384.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Drawing valid meaning from qualitative data:

- Toward a shared craft. In *Educational researcher* (Vol. 13). Sage Publications Sage CA: Thousand Oaks, CA.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Rulinawati. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*.
- Rulinawaty;, Samboteng;, L., Aripin;, S., & Hasanuddin. (2020). *Crafting Agile Bureaucracy : Transforming Work Ethics of Civil Servants and Organisational Culture of Bureaucracy in Indonesia*. 12(11), 692–714.
- Rulinawaty Kasmad, Samboteng, L., & Mahsyar, A. (2019). The Unwise Policy Of Community Based-Organisation: Can It Empower Them? Implementation Network Of Food Diversification In Indonesia Rulinawaty. *OPCION*, 35(22), 2900–2961. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rulinawaty, Samboteng, L., Aripin, S., Kasmad, M. R., Harta, R., Susanti, A., & Fadillah, S. (2021). Accountability Performance Public Service: Community Based Organization Solution for Base Public Service. *Proceedings of the First International Conference on Science, Technology, Engineering and Industrial Revolution (ICSTEIR 2020)*, 536(Icsteir 2020), 238–243. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210312.037>
- Schofield, J. (2001). Time for a revival? Public policy implementation: a review of the literature and an agenda for future research. *International Journal of Management Reviews*, 3(3), 245–263.